

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) telah berhasil menyelamatkan perekonomian kita selama krisis ekonomi. Ketika banyak perusahaan skala besar (korporasi) yang ambruk karena beban hutang yang sangat besar justru para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) bertindak sebagai pengaman perekonomian nasional. Sebagian besar diantara mereka mampu bertahan dengan baik ketika krisis ekonomi yang berkepanjangan sedang melanda Negara kita, padahal sektor ini memiliki akses yang minim dalam menerima penyaluran kredit maupun pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Struktur industri harus berorientasi ekspor dengan menggunakan sebagian besar bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Kalaupun diperlukan mengimpor peralatan produksi maka bea masuknya harus tidak boleh subsidi. Industri perbankan merupakan bagian penting dari perekonomian mengingat perannya sebagai perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain itu berperan pula dalam memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada perusahaan maupun perorangan.

Di zaman ekonomi pasar bebas yang akan di hadapi Indonesia ini memberikan dampak pada para masyarakat untuk beralih profesi sebagai wirausaha atau paling tidak mempunyai profesi sebagai usaha kecil dan menengah (UKM), karena disadari bahwa pekerjaan ini memberi hidup yang layak, permodalan bagi UKM menjadi salah satu tema pokok didalamnya untuk membentuk suatu bentuk usaha dalam merintis usaha.

Di Indonesia, salah satu keistimewaan usaha kecil dan menengah (UKM) terlihat ketika berguncangnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan dibandingkan dengan usaha besar. UKM ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan UKM juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut. UKM juga memiliki fleksibilitas jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar.<sup>1</sup> karena itulah, perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi jaringan bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

---

<sup>1</sup>Dayintapinasthika,wordpress," Usaha Kecil", dalam <http://www.usaha-kecil.com> , diakses tanggal 23 Februari 2017

Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) sektor usaha kecil dan menengah sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) sektor usaha kecil dan menengah mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan (3) sektor usaha kecil dan menengah sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu, merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara. Kebijakan yang dimaksud adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna.

Berkaitan dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Indonesia, diharapkan lebih banyak lagi tercipta masyarakat yang terjun ke dunia wirausaha. Dimana saat ini jumlah masih sangat relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk bangsa Indonesia.

---

<sup>2</sup> Jumhur, *Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di Kota Pontianak (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan Dari BMT)*, (Semarang : Jurnal Tidak Diterbitkan, 2009)

Tentunya fungsi utama memajukan UKM yaitu dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Hali ini tentunya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia yang masih terbilang tinggi.

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan Negara, karena fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Penyertaan modal, jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan, sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ,akad salam, akad *istishna*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk perbankan syariah memberi peluang tentang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus dalam hal ini penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu, sektor ekonomi di Indonesia secara factual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). pada saat krisis ekonomi, sektor ini mampu bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan.

Selain itu, secara yuridis komitmen pemerintah ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui Kerjasama Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dengan usaha besar. Oleh karena itu, dalam praktik Usaha Kecil dan Menengah seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan salah satu wujud Komitmen Pemerintah terhadap Usaha Kecil dan Menengah. Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk mengatasi kelemahan Usaha Kecil dan Menengah dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.

**Tabel 1.1**

**Data Perkembangan UMKM Tahun 2009-2016**

JENIS	TAHUN	JUMLAH
UMKM	2009	1.521.494
	2010	3.668.037
	2011	6.706.685
	2012	9.889.441
	2013	14.311.027
	2014	18.982.393
	2015	16.314.352
	2016	24.016.266

Sumber : Diolah dari laporan publikasi triwulan

Jumlah usaha kecil dan menengah memiliki nilai terendah (minimum) Rp 1.521.494 juta pada tahun 2009 pada Bank BRI Syariah dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar Rp 24.016.266 juta pada periode tahun 2016 dengan rata-rata sebesar Rp 15.488.900 juta. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pada periode penelitian, nilai usaha kecil dan menengah pada Bank BRI Syariah tidak melebihi standar maksimal yang ditetapkan BI yaitu 20 Triliun.

Kebutuhan akan dana ini baik diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja dan dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan). Dalam praktiknya lembaga keuangan dikelompokkan dalam 2 golongan besar yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya.<sup>3</sup> Pada alokasi pembiayaan dana usaha kecil dan menengah (UKM) maka dapat dilakukan berbagai alternatif lembaga pembiayaan, terdapat tiga alternatif pembiayaan yang dapat dipilih, yaitu kredit dari perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan modal ventura.<sup>4</sup> Modal ventura sebagai alternatif solusi, menyikapi berbagai hambatan dalam hal pembiayaan melalui perbankan tersebut, tampaknya pelaku UKM sudah harus memulai mencari dan menemukan solusi pembiayaan lain sebagai alternatif jalan tengah.

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hal. 29

<sup>4</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN 2003), hal. 46

Dalam dunia pembiayaan atau permodalan, selain dikenal istilah lembaga keuangan perbankan, kita juga mengenal lembaga keuangan bukan bank. Berbeda dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank ini tidak diperbolehkan mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat dalam menjalankan *core business* nya. Sumber dana diperoleh dari setoran para pemilik, baik lembaga keuangan non pemerintah maupun pemerintah.

Peran ini juga tidak lepas dari perbankan syariah yang pertama kali berdiri pada tahun 1992, tercatat hingga tahun 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank umum syariah (BUS) yaitu<sup>5</sup> : PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi

---

<sup>5</sup> Suharno, "Bank Syariah Center" dalam <http://banksyariahcenter.blogspot.co.id/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017

sangat berarti bagi berkembangnya UKM.<sup>6</sup> Pembiayaan UKM diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan UKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UKM adalah pembiayaan UKM, jadi keduanya tidak terlepas.

Pembiayaan yang diberlakukan untuk UKM pada bank syariah ini juga tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak ketiga.<sup>7</sup> Perkembangan jumlah dana dari pihak ketiga berasal melalui sumber dana *Al-wadiah, Mudharabah, Mudharabah Mutlaqah atau Mudharabah Muqayyadah*. Berdasarkan data dari BI tahun 2009-2016 perkembangan dari dana pihak ketiga dari tahun ke tahun mengalami perkembangan.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>6</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*,..... hal 22-23

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA 2007), hal. 56-61

<sup>8</sup>Departemen Perbankan Syariah Laporan Publikasi dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/default.aspx> , diakses pada tanggal 20 Maret 2017

**Tabel 1.2****Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2009-2016**

JENIS	TAHUN	JUMLAH
DANA PIHAK KETIGA	2009	125,509
	2010	769,011
	2011	1,284,499
	2012	1,869,183
	2013	2,854,877
	2014	3,920,772
	2015	4,654,760
	2016	5,306,321

Sumber : Diolah dari Statistik Bank Indonesia.

Data tersebut terlihat bahwa DPK yang dihimpun oleh Bank BRI Syariah pada tahun 2009 sampai 2016 mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada tahun 2009 DPK Bank BRI Syaria' h sebesar 125.509 juta dan meningkat pesat pada tahun - tahun setelahnya, pada tahun 2010 sebesar 769.011 juta, pada tahun 2011 sebesar 1.284.499 juta, pada tahun 2012 sebesar 1.869.183, pada tahun 2013 sebesar 2.854.877, pada tahun 2014 sebesar 3.920.772, pada tahun 2015 sebesar 4.654.760 juta, hingga pada tahun 2016 menghimpun dana pihak ketiga sebesar 5.306.321 juta.

Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena

berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.<sup>9</sup> Variabel Makro baik inflasi maupun tingkat margin pembiayaan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan setelah jumlah dana pihak ketiga.

**Tabel 1.3**

**Data Perkembangan Inflasi Tahun 2009-2016**

JENIS	TAHUN	JUMLAH
INFLASI	2009	9,17 %
	2010	3,72 %
	2011	7,02 %
	2012	3,65 %
	2013	4,57 %
	2014	8,22 %
	2015	6,96 %
	2016	3,49 %

Sumber : Diolah dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Fluktuatifnya perkembangan jumlah inflasi dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan pada tabel diatas kita temukan bahwa inflasi mengalami kenaikan pada tahun 2009 mencapai inflasi 9,17%, mengalami penurunan pada bulan Januari 2010 mencapai 3,72%, lalu mengalami peningkatan pada bulan berikutnya sampai pada tahun 2014 inflasi mencapai 8,22% dan mengalami penurunan hingga tahun 2016

---

<sup>9</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 176

mencapai 3,49%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan.<sup>10</sup>

**Tabel 1.4**

**Data Perkembangan Kurs Tahun 2009-2016**

JENIS	TAHUN	JUMLAH
KURS	2009	9.487
	2010	9.036
	2011	9.113
	2012	9.718
	2013	12.250
	2014	12.498
	2015	13.864
	2016	13.503

Sumber : Diolah dari Statistik Bank Indonesia.

Tabel 1.4 tersebut pada perkembangan kurs menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kurs mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2009 mencapai 9.487 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mencapai 9.113 mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2013 sampai 2015 mencapai 13.864. Pada tahun 2016 kurs USD terhadap Rupiah mengalami penurunan yaitu 13.503.

<sup>10</sup>Departemen Perbankan Syariah Inflasi dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/default>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

Kurs merupakan pertukaran antar mata uang yang berbeda. Dari perbedaan itu, maka akan terdapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Peran kurs juga memengaruhi berbagai sektor, beberapa sektor salah satunya dibidang perbankan Amerika Serikat sebagai Negara dengan mata uang yang kuat menjadi *basic* dalam penentuan nilai tukar di Indonesia. Hal ini yang menjadikan kurs mata uang Indonesia sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang Amerika Serikat. Pada saat kurs mata uang Amerika Serikat, dollar Amerika menguat, maka mata uang Indonesia rupiah akan melemah, begitu juga sebaliknya

**Tabel 1.5**

**Data Perkembangan Pendapatan Margin Tahun 2009-2016**

JENIS	TAHUN	JUMLAH
PENDAPATAN MARGIN	2009	175,013
	2010	427,896
	2011	612,949
	2012	887,848
	2013	1,133,476
	2014	1,335,164
	2015	1,458,382
	2016	1,533,338

Sumber : Diolah dari Statistik Bank Indonesia.

Kenaikan pertumbuhan jumlah pendapatan margin yang terjadi pada tahun 2009-2010. Lihatlah pada tabel 1.5 pada tahun 2009 jumlah

pendapatan margin mencapai Rp 175,013 juta. Tahun 2010 pendapatan margin juga mengalami kenaikan dengan jumlah Rp 427,896 juta. Begitu pula dengan tahun 2011 yang kenaikannya jauh lebih banyak yaitu Rp 612,949 juta. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 pendapatan margin mencapai jumlah Rp 887,848 juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 jumlah pendapatan margin juga mengalami kenaikan yaitu Rp 1,133,476 juta. Di tahun 2014 jumlah pendapatan margin mencapai Rp 1,335,164 juta. Tahun 2015 pun juga mengalami kenaikan yaitu Rp 1,458,382 juta. Jumlah pendapatan margin juga mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu Rp 1,533,338 juta.

PT Bank BRI Syariah merupakan akuisisi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>11</sup>

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan

---

<sup>11</sup> Herman, dalam <http://herman1986.blogspot.co.id/makalah-produk-produk-bri-syariah/html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017

berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti Bank Rakyat Indonesia Syariah. Selain itu Bank Rakyat Indonesia Syariah ini merupakan bank yang banyak diminati masyarakat Indonesia dari kalangan bawah, menengah dan atas.

Dari uraian diatas maka *penulis* tertarik melakukan penelitian secara mendalam tentang alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah dari bank syariah yang terfokus pada judul “ ***Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Pendapatan Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank BRI Syariah Periode 2009-2016.*** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang muncul dalam setiap variabel penelitian berdasarkan temuan peneliti, yakni :

### **1. Dana pihak ketiga**

Dana pihak ketiga yang terjadi mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dari mulai tahun 2009-2016, hingga pada tahun 2016 mencapai 5.306.321 juta. Berdasarkan laporan publikasi tersebut, pertumbuhan dana pihak ketiga berperan signifikan dalam mendongkrak perkembangan *asset* perbankan syariah terutama pada Bank BRI Syariah. Dana pihak ketiga meningkat terjadi pada deposito dan tabungan, sedangkan giro sedikit mengalami perlambatan.

### **2. Inflasi**

Inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Keadaan dimana inflasi yang didapatkan perusahaan tidak selalu naik, melainkan juga bisa mengalami penurunan. Inflasi juga berpengaruh terhadap UKM karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank syariah sehingga bunga UKM ikut naik juga, jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami kelesuan sebab permintaan agregat akan turun.

### 3. Kurs

Kurs yang ada pada Bank BRI Syariah mengalami fluktuatif yang berbeda setiap tahunnya. Fluktuasi yang terjadi tidak selalu naik ataupun turun drastis. Umumnya penurunan terjadi pada 2010 sampai dengan 2011.

### 4. Pendapatan Margin

Perkembangan Pendapatan margin mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 mencapai Rp 175.013 juta hingga pada tahun 2016 mencapai Rp 1.533.338 juta.

### 5. Usaha kecil dan menengah

Perkembangan usaha kecil dan menengah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut dapat dilihat pada grafik diatas. Banyak factor yang mendorong terjadi penurunan jumlah pembiayaan UKM, yaitu masih bervariasinya pembiayaan perbankan syariah jika dibandingkan dengan produk kredit bank konvensional juga menjadi factor internal penyebab perlambatan pertumbuhan bank syariah. Dengan varian produk pembiayaan yang masih cukup terbatas menyebabkan bank syariah kurang optimal mengambil pasar potensial yang seharusnya dimiliki oleh bank syariah, yaitu pasar yang menginginkan mengajukan pendanaan dari bank yang bebas riba. Faktor internal lainnya ialah efisiensi dalam kegiatan operasional bank. Bank syariah

masih kalah bersaing dengan perbankan konvensional dalam hal efisiensi terutama dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, difokuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara nilai tukar rupiah terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016?
5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan antara inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan antara nilai tukar rupiah terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga, inflasi, nilai tukar rupiah dan pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank Rakyat Indonesia syariah periode 2009-2016.

#### **E. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam

bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi *literatur* untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya. Serta, bisa memperluas penelitian selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai penghimpunan dana pada bank syariah untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan pemberian pembiayaan pada UKM serta mengetahui faktor yang mempengaruhi akan alokasi pembiayaan yang dihimpun bank syariah.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat bagi bank syariah adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi UKM serta strategi peningkatan UKM. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh jumlah dana pihak ketiga , inflasi, nilai tukar rupiah, dan pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah.
2. Peneliti mengambil sampel penelitian pada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016.

## **G. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua, antara lain : penegasan konseptual dan penegasan operasional.

Definisi atau penegasan operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau objek yang diteliti.<sup>12</sup> Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, kurs, dan pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah. Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abd. Aziz dkk. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2012), hlm. 8

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh, dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata I Tahun 2015*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 19

Adapun definisi operasional dan penegasan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

a) Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ )

Sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan.<sup>14</sup>

b) Inflasi ( $X_2$ )

Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga di pasar.<sup>15</sup>

c) Kurs Rupiah ( $X_3$ )

Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam persentase valuta asing yaitu pasar tempat berbagi mata uang yang berada diperdagangkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2002,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 63

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 33

<sup>16</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus , *Ilmu Makro Edisi 17* (Jakarta : PT. Media Global Edukasi, 2004),hal. 305

d) Pendapatan Margin ( $X_4$ )

Pendapatan margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.<sup>17</sup>

2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen atau variabel terikatnya adalah pembiayaan usaha kecil dan menengah (Y). Definisi pembiayaan yaitu (undang-undang perbankan No. 10) penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar lampiran, pedoman translitrasi, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu :

---

<sup>17</sup> Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No: 9/Kep/M.KUKM I/IX/2004, Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 2004

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 92

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari : a) latar belakang pemilihan judul, b) identifikasi dan pembatasan masalah, c) rumusan masalah yang akan diteliti, d) tujuan penelitian dan manfaat diadakan penelitian, e) hipotesis, f) kegunaan penelitian, g) penegasan istilah , h) sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti jumlah dana pihak ketiga, inflasi, kurs, pendapatan margin dan alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah. Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini, dan kerangka konseptual di bagian akhir.
- BAB III Metode Penelitian terdiri dari : a) Pendekatan dan jenis penelitian, b) Populasi, sampling dan sampel penelitian, c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, d) Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian terdiri dari hasil penelitian (yang berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan, dalam penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.
- BAB VI Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan, dan

memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.